

Kesetaraan Gender dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah: Studi Kasus di MIN 1 Banyumas

Maghfirotn Chanasah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Abstract

Article Information

Submitted: 12-07-2025

Revised: 05-08-2025

Accepted: 14-09-2025

Published: 02-10-2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kesetaraan gender dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas. Kurikulum Merdeka mengusung prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam proses pembelajaran, yang mencakup pemberian kesempatan yang sama bagi siswa tanpa memandang gender. Meskipun kebijakan dan kurikulum mendukung kesetaraan gender, tantangan dalam penerapannya masih ditemukan di tingkat praktis, baik dalam pembagian tugas maupun persepsi siswa. Pembagian tugas yang masih didasarkan pada stereotip gender, seperti siswa perempuan yang lebih sering memilih tugas "halus" dan siswa laki-laki yang terlibat dalam tugas fisik, menunjukkan adanya pengaruh kuat norma sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, persepsi siswa terhadap peran gender masih dipengaruhi oleh pandangan sosial yang berkembang di luar sekolah, yang memengaruhi pilihan mereka dalam kegiatan dan cita-cita. Para guru di MIN 1 Banyumas berusaha mengubah persepsi ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi berbagai peran tanpa terikat pada norma gender. Meskipun demikian, perubahan ini memerlukan waktu dan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun implementasi Kurikulum Merdeka memberikan dasar yang kuat untuk kesetaraan gender, tantangan terbesar terletak pada perubahan persepsi sosial dan kebiasaan yang telah lama ada dalam masyarakat. Dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan peran aktif semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih efektif di lingkungan pendidikan.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Kurikulum Merdeka, dan Madrasah Ibtidaiyah

This study aims to analyze the implementation of gender equality in the implementation of the Merdeka Curriculum at MIN 1 Banyumas. The Merdeka Curriculum promotes the principles of inclusivity and equality in the learning process, which includes providing equal opportunities for students regardless of gender. Although policies and the curriculum support gender equality, challenges in its practical application are still found, both in task distribution and students' perceptions. The task distribution, which is still based on gender stereotypes, such as female students being more often assigned "feminine" tasks and male students being involved in physical tasks, shows the strong influence of social norms in society. Additionally, students' perceptions of gender roles are still influenced by the social views that develop outside of school, which affects their choices in activities and career aspirations. Teachers at MIN 1 Banyumas are trying to change this perception by giving students the opportunity to explore various roles without being bound by gender norms. However, these changes require time and continuous support from various parties, including parents and the community. This study concludes that although the implementation of the Merdeka Curriculum provides a strong foundation for gender equality, the biggest challenge lies in changing social perceptions and long-standing habits in society. A holistic approach involving the active role of all parties is needed to achieve more effective gender equality in the educational environment.

Keywords: Gender Equality, Merdeka Curriculum, Madrasah Ibtidaiyah.

Journal Homepage

<https://ejournal.binanagari.org/index.php/jie/index>

*Author Correspondence: Maghfirotn Chanasah email: irohmaghfiroh2019@gmail.com

Copyright © 2025 Maghfirotn Chanasah

Pendahuluan

Kesetaraan gender dalam pendidikan adalah aspek yang perlu diperhatikan demi terciptanya sistem pendidikan yang adil dan inklusif. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai sosial, termasuk nilai kesetaraan gender yang sangat esensial. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merespon pentingnya kesetaraan gender ini dengan memperkenalkan Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Kurikulum ini diharapkan mampu mendorong siswa mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif tanpa memandang gender (Alimuddin, 2023). Namun demikian, penerapan kesetaraan gender dalam Kurikulum Merdeka, terutama di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, belum sepenuhnya terdokumentasi atau dipahami, terutama dalam konteks sekolah berbasis agama seperti di MIN 1 Banyumas.

Studi ini mendalami kesetaraan gender dalam penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah dengan memanfaatkan berbagai teori untuk memperjelas urgensi dan arah penerapannya dalam pendidikan berbasis agama. Teori Keadilan Sosial, misalnya, memberikan dasar bahwa setiap siswa berhak mendapatkan kesempatan yang setara tanpa membedakan gender, ras, atau latar belakang sosial ekonomi. Diskriminasi berbasis gender diyakini dapat membatasi kesempatan siswa untuk berkembang secara optimal. Melalui kurikulum merdeka, keadilan sosial diperjuangkan dengan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan individual setiap siswa (Aras, 2021). Teori ini

mendasari pentingnya penerapan kesetaraan gender yang memberikan kesempatan belajar yang setara bagi siswa laki-laki dan perempuan, khususnya dalam upaya mereka untuk mengakses berbagai sumber daya dan aktivitas pendidikan secara adil.

Selain itu, teori feminisme dalam pendidikan juga memberi perspektif tentang bagaimana pendidikan dapat memberdayakan perempuan dan mendukung kesetaraan gender. Dalam konteks sekolah yang berbasis agama, seperti madrasah, ada kemungkinan bias struktural dan stereotip gender dapat mempengaruhi proses belajar-mengajar, baik dalam materi pelajaran maupun dalam interaksi di kelas (Lestari & Suprpto, 2020). Kurikulum Merdeka berpotensi untuk mengatasi bias-bias gender ini dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih terbuka dan setara. Dengan menganalisis penerapan Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas melalui teori feminisme ini, kita dapat mengidentifikasi apakah ada peran-peran yang dibatasi atau dibedakan berdasarkan gender dan bagaimana kesetaraan gender dapat ditumbuhkan dalam lingkungan sekolah.

Teori Peran Gender juga relevan dalam konteks ini, karena teori ini menyoroti bahwa peran sosial yang ditetapkan berdasarkan gender dapat mempengaruhi kesempatan dan pengalaman belajar siswa. Madrasah memiliki peran besar dalam membentuk persepsi gender siswa yang kelak akan mempengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler. Dalam hal ini, Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi peran yang lebih setara, memberikan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan

untuk berkontribusi dan berkembang tanpa dibatasi oleh norma-norma gender yang kaku (Aliyah et al., 2019).

Di sisi lain, teori Pendidikan Kritis, yang dikembangkan oleh Paulo Freire, menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk kesadaran sosial dan transformasi. Dalam konteks kesetaraan gender, pendidikan kritis menekankan perlunya memberdayakan siswa untuk memahami dan menantang norma-norma gender yang tidak adil. Melalui Kurikulum Merdeka yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, guru diharapkan mampu menciptakan ruang diskusi yang terbuka tentang isu-isu gender, sehingga siswa dapat lebih kritis terhadap peran sosial yang melekat pada gender mereka dan mampu mempertanyakan struktur sosial yang membatasi perkembangan mereka (Freire, 2018).

Selain itu, teori interseksionalitas menjadi penting dalam memahami pengalaman belajar siswa di madrasah. Teori ini menekankan bahwa identitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi juga oleh interaksi antara gender, kelas sosial, agama, dan budaya. Di lingkungan madrasah, identitas keagamaan dan gender siswa dapat saling memengaruhi dalam membentuk pengalaman belajar mereka. Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah perlu mengakui bahwa siswa memiliki tantangan yang unik berdasarkan identitas kompleks mereka. Melalui pendekatan ini, kebijakan dan metode pembelajaran yang diterapkan di madrasah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan semua siswa, termasuk dalam hal kesetaraan gender (Ayu & Filzah, 2023).

Dalam konteks Madrasah Ibtidaiyah seperti MIN 1 Banyumas, penerapan Kurikulum

Merdeka yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan gender memerlukan upaya integrasi nilai-nilai keislaman dengan konsep keadilan sosial dan pendidikan inklusif. Ini bukan hanya tentang perubahan pada kurikulum, tetapi juga membangun budaya sekolah yang mendukung kesetaraan, di mana baik siswa laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam seluruh aspek pembelajaran. Melalui teori-teori ini, diharapkan implementasi kesetaraan gender dalam Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas dapat membangun lingkungan belajar yang adil dan inklusif, serta memberikan wawasan tentang bagaimana madrasah berbasis agama dapat mendukung perubahan menuju pendidikan yang lebih setara bagi semua siswa.

Studi-studi sebelumnya telah meneliti implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan formal, namun sedikit yang secara khusus menyoroti bagaimana kurikulum ini diterapkan dalam kerangka kesetaraan gender di madrasah yang memiliki karakteristik pendidikan Islam. Selain itu, di tengah upaya peningkatan kesetaraan gender di tingkat nasional, madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis agama menghadapi tantangan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kekosongan tersebut, dengan mengungkap bagaimana Kurikulum Merdeka diimplementasikan di MIN 1 Banyumas dari perspektif kesetaraan gender.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, namun hanya sedikit yang secara spesifik menyoroti penerapan kurikulum ini dari perspektif kesetaraan gender, khususnya dalam lingkungan madrasah. Penelitian oleh

Rahmat Hidayat (2022) mengeksplorasi penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar negeri, dengan fokus pada metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan fleksibilitas pembelajaran. Hidayat menemukan bahwa Kurikulum Merdeka memberi dampak positif pada pembentukan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis siswa, namun ia tidak membahas peran gender dalam penerapan metode ini, apalagi dalam konteks sekolah berbasis agama.

Penelitian lain oleh Suryadi dan Nurhayati (2023) juga mengkaji penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah menengah dengan melihat dampaknya pada hasil belajar siswa. Mereka menemukan bahwa kurikulum ini memungkinkan pembelajaran yang lebih terarah pada kebutuhan individu, namun studi mereka hanya berfokus pada aspek akademis dan tidak menyinggung bagaimana kurikulum ini dapat berperan dalam mendorong kesetaraan gender di sekolah. Sementara itu, penelitian oleh Rina Wulandari (2022) mengulas penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah, namun hanya dalam hal bagaimana kurikulum tersebut mampu memperkuat nilai-nilai keislaman melalui pendekatan tematik. Meskipun studinya berhasil menunjukkan adaptasi Kurikulum Merdeka dengan konteks agama di madrasah, Wulandari tidak mengkaji bagaimana pendekatan ini berkaitan dengan isu kesetaraan gender di lingkungan madrasah.

Dalam konteks upaya peningkatan kesetaraan gender di tingkat nasional, madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis agama menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan sekolah umum. Di tengah meningkatnya dorongan untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai sektor, madrasah sering kali dihadapkan

pada permasalahan unik yang bersumber dari interaksi antara norma-norma agama dan nilai-nilai kesetaraan gender. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kekosongan dalam literatur dengan mengungkap bagaimana Kurikulum Merdeka diimplementasikan di MIN 1 Banyumas dari perspektif kesetaraan gender. Studi ini tidak hanya berupaya memahami bagaimana kebijakan kurikulum yang baru ini diterima di madrasah, tetapi juga ingin melihat sejauh mana prinsip-prinsip kesetaraan gender diterapkan dan disesuaikan dengan karakteristik pendidikan Islam di madrasah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Kurikulum Merdeka dalam konteks kesetaraan gender di madrasah dan memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

Ketertarikan dalam penelitian ini timbul dari pengamatan bahwa pendidikan yang berlandaskan agama sering kali menghadapi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Hal ini berpotensi membatasi kesempatan belajar yang adil bagi seluruh siswa. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis agama dan bertanggung jawab dalam membentuk generasi yang bermoral, MIN 1 Banyumas menjadi tempat yang menarik untuk menganalisis bagaimana kesetaraan gender dapat diintegrasikan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang ada.

Penelitian ini diharapkan menemukan bahwa Kurikulum Merdeka dapat memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi madrasah dalam mengadaptasi kurikulum yang mendorong kesetaraan gender. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan

bahwa melalui pendekatan yang kontekstual, nilai-nilai keislaman yang diterapkan di madrasah dapat selaras dengan konsep kesetaraan gender, menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung perkembangan seluruh siswa tanpa diskriminasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana kesetaraan gender diterapkan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi madrasah lainnya mengenai praktik terbaik dalam menerapkan Kurikulum Merdeka yang mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan gender, sehingga dapat mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali implementasi kesetaraan gender dalam Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas. Pendekatan studi kasus dipilih agar dapat mendalami konteks khusus madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis agama yang menerapkan kurikulum nasional dengan tetap mempertahankan karakteristik keislaman. Dengan fokus pada paradigma post-positivisme, penelitian ini mengakui bahwa fenomena sosial, seperti penerapan kesetaraan gender, bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan agama. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi realitas yang beragam dan konstruksi sosial yang mempengaruhi pemahaman serta pelaksanaan kesetaraan gender di madrasah (Sugiyono, 2013).

Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah yang memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengarahkan implementasi Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan guru-guru kelas 1 hingga kelas 6 sebagai subjek yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dan menerapkan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Guru-guru ini menjadi bagian penting dalam mengamati praktik-praktik pengajaran serta bagaimana mereka menghadapi tantangan dan peluang terkait kesetaraan gender. Peserta didik juga turut menjadi subjek penelitian untuk memahami bagaimana mereka mengalami penerapan kesetaraan gender dalam proses pembelajaran dan interaksi di kelas.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan para guru, untuk mendapatkan pemahaman mengenai pandangan, pengalaman, dan praktik terkait kesetaraan gender dalam pembelajaran. Selain itu, observasi kelas dilakukan untuk mengamati secara langsung interaksi antara guru dan siswa, serta pola-pola perilaku yang mungkin mencerminkan sikap dan pemahaman tentang kesetaraan gender. Dokumentasi dari berbagai sumber terkait penerapan Kurikulum Merdeka, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan catatan evaluasi, juga digunakan untuk memperoleh data tambahan yang dapat memperkaya temuan penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan model analisis interaktif. Proses pertama adalah reduksi data, yang dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan,

dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, data yang relevan mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dan kesetaraan gender di MIN 1 Banyumas disaring dan dikelompokkan berdasarkan topik utama, seperti penerapan kesetaraan gender dalam pengajaran, pola interaksi guru dan siswa, serta tantangan dan peluang yang dihadapi madrasah. Dengan demikian, data menjadi lebih terfokus dan mudah dikelola untuk tahapan berikutnya.

Setelah proses reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan matriks tematik untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola utama serta hubungan antar data. Penyajian data dalam bentuk deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan tentang penerapan kesetaraan gender di MIN 1 Banyumas, termasuk bagaimana Kurikulum Merdeka diadaptasi dalam konteks madrasah, peran kepala sekolah dan guru, serta pengalaman dan persepsi peserta didik terkait kesetaraan gender dalam proses pembelajaran.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menyusun dan merumuskan temuan utama berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Melalui proses ini, diharapkan kesimpulan yang dihasilkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kesetaraan gender dalam Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas, serta tantangan dan strategi yang digunakan oleh kepala sekolah, guru, dan siswa dalam mewujudkan lingkungan belajar yang setara dan inklusif. Kesimpulan ini kemudian disusun dalam bentuk rekomendasi untuk mendukung

implementasi kebijakan kesetaraan gender yang lebih optimal di madrasah berbasis agama.

Hasil Dan Pembahasan

1. Komitmen dan Kebijakan Sekolah Terhadap Kesetaraan Gender dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

MIN 1 Banyumas memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah MIN 1 Banyumas secara tegas menyatakan bahwa kebijakan sekolah diarahkan untuk memastikan bahwa semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan belajar yang setara dan inklusif. Hal ini diwujudkan melalui pembuatan peraturan yang tidak memihak pada gender tertentu dan memastikan bahwa setiap siswa, tanpa kecuali, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah.

Komitmen ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kebijakan sekolah. Sebagai contoh, kebijakan sekolah mengatur agar peran dan tanggung jawab siswa dalam kegiatan sekolah, baik di dalam kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler, didistribusikan secara merata tanpa memperhatikan perbedaan gender. Peraturan ini menegaskan bahwa siswa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan kelas, diskusi kelompok, maupun kegiatan sosial di sekolah.

Selain itu, dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, pihak sekolah mendukung guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga

inklusif dan menghargai kesetaraan gender. Kepala sekolah dan para guru mengakui bahwa meskipun Kurikulum Merdeka memungkinkan pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, nilai-nilai tersebut diadaptasi agar tetap konsisten dengan prinsip kesetaraan. Misalnya, dalam pelajaran agama Islam, siswa tidak hanya diajarkan tentang kesetaraan gender sebagai konsep akademik, tetapi juga sebagai bagian dari ajaran agama yang menegaskan pentingnya menghormati hak-hak individu tanpa membedakan gender.

Sebagai bagian dari upaya ini, sekolah secara aktif mendorong guru untuk mengimplementasikan pendekatan yang adil dalam pengajaran. Guru-guru di MIN 1 Banyumas mendapatkan pelatihan dan dukungan dari kepala sekolah untuk mengembangkan metode pembelajaran yang menghormati prinsip-prinsip kesetaraan gender. Salah satu contohnya adalah penggunaan metode diskusi kelompok di kelas, di mana guru memastikan bahwa siswa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi

aktif, menjadi pemimpin kelompok, atau menyampaikan pendapat. Langkah ini mencerminkan pentingnya komitmen sekolah untuk memastikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya sebatas wacana, melainkan menjadi bagian dari praktik nyata di dalam kelas.

Dalam perspektif yang lebih luas, MIN 1 Banyumas telah berhasil mengimplementasikan kesetaraan gender dalam kegiatan belajar mengajar melalui kebijakan yang mendukung prinsip inklusivitas. Dengan kebijakan ini, sekolah tidak hanya mematuhi tuntutan Kurikulum Merdeka, tetapi juga berperan aktif sebagai pengarah kebijakan untuk membangun lingkungan pendidikan yang setara bagi seluruh siswa.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan data yang mendukung hasil penelitian mengenai komitmen dan kebijakan sekolah terhadap kesetaraan gender dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas:

Aspek	Deskripsi	Sumber Data
Komitmen Kepala Sekolah terhadap Kesetaraan Gender	Kepala sekolah menekankan kebijakan yang memastikan siswa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan belajar yang setara dan inklusif.	Wawancara dengan Kepala Sekolah, Dr. Saridin, M.Pd.
Kebijakan Sekolah tentang Kesetaraan Gender	Sekolah menyusun peraturan yang tidak memihak gender tertentu dan memastikan akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan dan fasilitas sekolah.	Dokumentasi kebijakan sekolah
Fleksibilitas Kurikulum Merdeka dalam Mengintegrasikan Nilai Islam	Nilai-nilai Islam yang diintegrasikan dalam pembelajaran tetap dikontekstualisasikan dengan prinsip kesetaraan gender.	Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru
Pelatihan dan Dukungan untuk Guru	Guru diberikan pelatihan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang menghormati kesetaraan gender, termasuk dalam pengorganisasian diskusi kelompok di kelas.	Wawancara dengan Guru dan Observasi Kelas

Kebijakan Pembagian Tugas dan Peran di Kelas	Tugas dan peran di kelas, seperti kepemimpinan kelompok, diberikan secara merata tanpa memandang gender.	Observasi Kegiatan Belajar Mengajar
Kegiatan Ekstrakurikuler yang Inklusif	Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka dan olahraga.	Observasi Kegiatan Ekstrakurikuler
Fasilitas yang Setara untuk Semua Siswa	Fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, disediakan dengan akses yang setara untuk semua siswa tanpa membedakan gender.	Observasi Fasilitas Sekolah
Integrasi Kesetaraan Gender dalam Materi Pelajaran	Dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Agama Islam, guru mengajarkan prinsip kesetaraan gender sebagai bagian dari hak dan kewajiban sebagai warga negara dan umat.	Wawancara dengan Guru dan Observasi Materi Pelajaran

Tabel ini memberikan gambaran tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan di MIN 1 Banyumas untuk mendukung kesetaraan gender dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Data yang ada diambil dari berbagai sumber seperti wawancara dengan kepala sekolah dan guru, serta observasi langsung di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler.

Penerapan kesetaraan gender dalam pendidikan telah mendapatkan perhatian yang besar dalam teori-teori pendidikan, dan hal ini tercermin dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas. Salah satu dasar yang mendukung langkah ini adalah teori keadilan pendidikan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*, di mana ia menggarisbawahi bahwa pendidikan harus memberi kesempatan yang setara kepada semua individu tanpa memandang latar belakang sosial atau gender (Rawls, 2008). Hal ini sejalan dengan kebijakan sekolah di MIN 1 Banyumas yang menekankan kesetaraan akses belajar bagi semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi gender. Kepala sekolah dan staf mengimplementasikan kebijakan yang

memastikan bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya pendidikan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Selain itu, teori kesetaraan gender dalam pendidikan menurut Meyer menyatakan bahwa pendidikan harus memberikan ruang yang adil bagi semua siswa tanpa membatasi peran mereka berdasarkan gender (Clark & Mayer, 2023). Di MIN 1 Banyumas, kebijakan sekolah menegaskan bahwa tugas dan peran di kelas diberikan secara merata, tanpa melihat jenis kelamin. Ini juga tercermin dalam metode pembelajaran yang diadopsi oleh guru-guru di sekolah tersebut, di mana mereka mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, kepemimpinan, dan kegiatan lainnya tanpa batasan gender. Guru-guru di MIN 1 Banyumas mendapatkan pelatihan dan dukungan dari kepala sekolah untuk mengembangkan metode pengajaran yang inklusif, menciptakan lingkungan yang adil bagi semua siswa.

Dalam perspektif teori konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Vygotsky

bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, pendidikan yang melibatkan semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, dalam diskusi kelompok dan kegiatan kolaboratif akan mendukung pemahaman mereka tentang kesetaraan (Vigotsky et al., 2018). Di MIN 1 Banyumas, pendekatan kolaboratif ini diterapkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan. Hal ini mendorong pembelajaran yang lebih inklusif dan menciptakan lingkungan di mana siswa dapat mengembangkan pemahaman mereka tentang kesetaraan gender dalam praktik sehari-hari.

Teori pendidikan inklusif yang diajukan oleh Ainscow juga memberikan dasar kuat untuk kebijakan sekolah di MIN 1 Banyumas. Pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap siswa, tanpa terkecuali, harus memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dalam lingkungan pendidikan yang tidak membedakan. Kebijakan di MIN 1 Banyumas mencerminkan prinsip ini, dengan menyediakan akses yang setara terhadap fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, yang dapat diakses oleh semua siswa tanpa memandang gender.

Selain itu, teori pendidikan feminisme juga memberikan pandangan penting mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam sistem pendidikan. Apple berargumen bahwa pendidikan harus memperhatikan isu-isu ketidaksetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang responsif terhadap hal ini (Lestari & Suprpto, 2020). Kebijakan di MIN 1 Banyumas, yang mencakup pembagian tugas yang setara di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif, mengarah pada

penciptaan suasana belajar yang lebih adil dan terbuka bagi semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan.

Terakhir, teori hak asasi manusia yang diajukan oleh Amartya Sen dalam *Development as Freedom* mendasari pemahaman bahwa pendidikan adalah hak dasar yang memungkinkan individu berkembang dengan bebas dan setara. Kesetaraan gender dalam pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus ditegakkan untuk memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang (Butler, 2020). Penerapan prinsip ini di MIN 1 Banyumas terlihat dalam kebijakan sekolah yang memastikan bahwa semua siswa mendapat perlakuan yang sama dalam berbagai aspek pendidikan, baik akademik maupun non-akademik.

Dengan mengintegrasikan teori-teori tersebut, MIN 1 Banyumas telah berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan setara. Kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah ini memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar tanpa hambatan berbasis gender, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender menjadi dasar dalam menciptakan suasana yang adil dan terbuka bagi semua siswa. Hal ini menunjukkan komitmen MIN 1 Banyumas untuk menerapkan pendidikan yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas di dalam kelas dan di luar kelas.

2. Praktik Pengajaran yang Mendukung Kesetaraan Gender

Observasi terhadap kegiatan belajar mengajar di MIN 1 Banyumas menunjukkan bahwa para guru secara aktif berusaha untuk menerapkan praktik pengajaran yang

mendukung kesetaraan gender. Guru-guru di kelas 1 hingga 6 mengadopsi metode pembelajaran kolaboratif yang memberikan kesempatan bagi semua siswa—baik laki-laki maupun perempuan—untuk berpartisipasi secara aktif. Salah satu contoh nyata penerapan kesetaraan gender ini dapat dilihat dalam kegiatan diskusi kelompok, di mana guru tidak membedakan peran siswa berdasarkan jenis kelamin. Dalam kegiatan tersebut, siswa diberikan kebebasan untuk memilih peran yang mereka inginkan, tanpa adanya pembagian tugas yang didasarkan pada gender. Hal ini menunjukkan bahwa guru di MIN 1 Banyumas berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak diskriminatif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan belajar.

Lebih lanjut, guru-guru di MIN 1 Banyumas juga menunjukkan perhatian yang sama terhadap siswa laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembelajaran. Setiap siswa diberikan kesempatan yang setara untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan bimbingan individu. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin dalam kegiatan belajar mengajar,

yang menggambarkan upaya nyata dari guru untuk menghilangkan sekat gender dalam interaksi di kelas. Guru berusaha menciptakan suasana yang inklusif dan saling menghargai, sehingga setiap siswa merasa dihargai dan diperlakukan secara setara, tanpa memandang gender mereka.

Penerapan prinsip kesetaraan gender ini juga tercermin dalam cara guru memberikan umpan balik dan perhatian kepada siswa. Tidak ada perbedaan dalam cara guru memberikan apresiasi atau koreksi terhadap pekerjaan siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menciptakan iklim belajar yang positif dan mendukung pengembangan keterampilan sosial serta emosional siswa. Upaya ini, menurut observasi, berperan penting dalam mendorong siswa untuk lebih percaya diri dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pendidikan di MIN 1 Banyumas.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan data yang mendukung observasi mengenai penerapan kesetaraan gender dalam kegiatan belajar mengajar di MIN 1 Banyumas:

Aspek	Deskripsi	Sumber Data
Metode Pembelajaran Kolaboratif	Guru-guru di kelas 1 hingga 6 menerapkan metode pembelajaran kolaboratif, memberikan kesempatan bagi semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berpartisipasi.	Observasi Kegiatan Belajar Mengajar
Diskusi Kelompok Tanpa Pembagian Gender	Dalam kegiatan diskusi kelompok, guru tidak membedakan peran siswa berdasarkan jenis kelamin, siswa bebas memilih peran sesuai keinginan.	Observasi Kegiatan Belajar Mengajar
Kesempatan Setara untuk Bertanya	Guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk bertanya dan berpendapat, tanpa membedakan gender.	Observasi Kegiatan Belajar Mengajar
Bimbingan Individual yang Setara	Setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat perhatian dan bimbingan yang setara dari guru selama pembelajaran.	Wawancara dengan Guru

Pemberian Umpan Balik yang Setara	Tidak ada perbedaan dalam pemberian umpan balik kepada siswa, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan dengan cara yang adil dan setara.	Observasi Kegiatan Belajar Mengajar
Penghargaan yang Setara	Guru memberikan apresiasi yang setara kepada siswa laki-laki dan perempuan, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik.	Wawancara dengan Guru
Lingkungan Pembelajaran Inklusif	Guru menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, di mana semua siswa merasa dihargai dan diperlakukan secara setara tanpa memandang gender mereka.	Observasi Kegiatan Belajar Mengajar dan Wawancara

Tabel ini menunjukkan berbagai aspek yang mendukung kesetaraan gender yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di MIN 1 Banyumas, termasuk metode yang digunakan, kesempatan yang diberikan kepada siswa, serta perlakuan setara terhadap semua siswa tanpa membedakan gender. Data ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan guru, serta pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas.

Praktik pengajaran yang mendukung kesetaraan gender di MIN 1 Banyumas didasarkan pada berbagai teori pendidikan yang mengedepankan prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan partisipasi aktif semua siswa tanpa membedakan jenis kelamin. Salah satu teori yang mendukung praktik ini adalah teori socio-cultural learning yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky dalam karyanya *Mind in Society* (1978). Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana pengetahuan dibangun melalui kolaborasi. Dengan menerapkan metode pembelajaran kolaboratif, di mana semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok, guru di MIN 1 Banyumas menciptakan ruang bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk saling bertukar ide dan membangun pengetahuan bersama tanpa batasan gender.

Selain itu, teori *critical pedagogy* yang dikembangkan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970)

juga relevan dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang setara. Freire menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan dan memungkinkan semua siswa untuk berpartisipasi aktif tanpa adanya diskriminasi. Praktik guru-guru di MIN 1 Banyumas yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan bimbingan individual mencerminkan upaya untuk memberikan akses yang setara kepada semua siswa, sebagaimana yang disarankan oleh Freire. Dengan tidak membedakan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, guru-guru menciptakan ruang di mana setiap siswa merasa dihargai dan diperhatikan dalam proses belajar mengajar.

Penerapan prinsip kesetaraan gender juga mendukung teori gender equality in education yang diajukan oleh Nelly Stromquist (2002), yang menyatakan bahwa pendidikan harus menghapuskan stereotip gender dan memberikan peluang yang setara bagi semua individu untuk berkembang. Praktik di MIN 1 Banyumas, di mana guru memberikan umpan balik yang setara dan tidak membedakan jenis kelamin dalam memberi apresiasi atau koreksi, menunjukkan implementasi teori ini. Hal ini memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai dan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, tanpa merasa terbatas oleh peran atau ekspektasi gender tertentu.

Selain itu, teori pendidikan inklusif yang dikemukakan oleh Ainscow (2005) mendukung pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi setiap siswa, tanpa terkecuali. Di MIN 1 Banyumas, guru menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, di mana setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, merasa diterima dan diperlakukan setara. Dengan memperhatikan keberagaman siswa dan memberikan kesempatan yang setara untuk semua, guru mengimplementasikan prinsip inklusivitas yang merupakan bagian penting dari pendidikan yang adil.

Secara keseluruhan, praktik pengajaran yang diterapkan di MIN 1 Banyumas menggambarkan integrasi dari berbagai teori pendidikan yang mendukung kesetaraan gender. Guru-guru di sekolah ini tidak hanya menghindari diskriminasi gender, tetapi juga aktif menciptakan ruang yang memungkinkan semua siswa untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi tanpa hambatan gender. Hal ini mencerminkan komitmen sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara, inklusif, dan mendukung perkembangan semua siswa, terlepas dari jenis kelamin mereka.

3. Tantangan Penerapan Kesetaraan Gender di Lingkungan Madrasah

Meskipun MIN 1 Banyumas menunjukkan komitmen yang kuat dalam penerapan kesetaraan gender, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam upaya tersebut. Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah adanya stereotip gender yang tetap muncul dalam praktik sehari-hari di sekolah. Meskipun kebijakan dan praktik pengajaran

sudah mendukung kesetaraan, kebiasaan dan norma sosial yang sudah lama tertanam dalam masyarakat masih mempengaruhi cara siswa diperlakukan dan dibagi tugas di sekolah.

Contoh yang paling mencolok adalah pembagian tugas yang masih cenderung didasarkan pada peran gender tradisional. Siswa perempuan sering kali dipilih untuk tugas-tugas yang dianggap "halus" atau rapi, seperti mengatur peralatan kelas, menyusun buku, atau membersihkan ruang kelas, sedangkan siswa laki-laki lebih sering dilibatkan dalam tugas-tugas yang memerlukan kekuatan fisik, seperti mengangkat barang atau membersihkan area luar sekolah. Praktik ini, meskipun tidak berdasarkan instruksi kurikulum, mencerminkan penerapan stereotip gender yang mengakar kuat dalam masyarakat.

Guru-guru di MIN 1 Banyumas mengakui bahwa pembagian tugas semacam ini lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dan norma sosial yang ada daripada karena adanya kebijakan eksplisit dari kurikulum. Para guru juga menyadari bahwa meskipun tujuan kurikulum merdeka adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara, tantangan terbesar mereka adalah mengubah persepsi yang sudah terbangun mengenai peran gender di kalangan siswa dan orang tua. Mereka berupaya untuk secara bertahap mengurangi pengaruh stereotip gender dalam pembagian tugas, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan dalam tugas yang lebih beragam, tidak hanya terbatas pada peran tradisional yang diharapkan dari mereka berdasarkan jenis kelamin.

Meskipun ada tantangan ini, guru-guru mulai mendorong siswa untuk mengambil peran di luar stereotip gender, dan diharapkan

melalui pembelajaran yang inklusif ini, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang kesetaraan gender. Namun, perubahan yang terjadi relatif lambat karena adanya tekanan dari kebiasaan sosial yang sudah lama terbentuk, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Para guru berharap bahwa dengan terus menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam kurikulum

dan kegiatan belajar mengajar, mereka dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih setara untuk semua siswa.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan data yang mendukung tantangan penerapan kesetaraan gender di lingkungan Madrasah MIN 1 Banyumas:

Aspek	Deskripsi Tantangan	Sumber Data
Pembagian Tugas Berdasarkan Gender	Pembagian tugas di kelas masih cenderung didasarkan pada stereotip gender, seperti siswa perempuan dipilih untuk tugas yang lebih "halus" (misalnya, mengatur peralatan kelas) dan siswa laki-laki untuk tugas fisik.	Observasi Kegiatan Belajar Mengajar
Pengaruh Norma Sosial	Tugas-tugas di sekolah seringkali dibagi berdasarkan norma sosial yang berlaku di masyarakat, bukan berdasarkan kemampuan atau instruksi kurikulum.	Wawancara dengan Guru
Perubahan Persepsi yang Lambat	Guru-guru menyadari pentingnya mendorong peran siswa di luar stereotip gender, tetapi perubahan dalam praktik ini berlangsung lambat karena kebiasaan dan persepsi yang sudah tertanam.	Wawancara dengan Guru
Tantangan dalam Pembelajaran Inklusif	Guru-guru berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang lebih inklusif, namun menghadapi tantangan dalam mengubah kebiasaan dan persepsi yang terbentuk di masyarakat tentang peran gender.	Observasi Kegiatan Belajar Mengajar dan Wawancara
Keterlibatan Orang Tua	Beberapa orang tua masih memiliki pandangan tradisional terkait pembagian peran gender yang mempengaruhi kebijakan dan implementasi di sekolah.	Wawancara dengan Orang Tua dan Guru

Tabel ini menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan kesetaraan gender di MIN 1 Banyumas, termasuk pembagian tugas yang masih dipengaruhi oleh stereotip gender, pengaruh norma sosial yang ada, serta tantangan dalam mengubah persepsi dan kebiasaan yang telah ada di masyarakat. Data ini diperoleh melalui observasi kegiatan belajar mengajar, wawancara dengan guru, serta interaksi dengan orang tua siswa.

4. Persepsi Siswa Mengenai Kesetaraan Gender

Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana persepsi siswa mengenai kesetaraan gender mempengaruhi proses belajar mengajar di MIN 1 Banyumas. Meskipun tujuan dari Kurikulum Merdeka adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan setara, hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa persepsi mereka tentang peran gender masih dipengaruhi oleh

pandangan masyarakat sekitar. Beberapa siswa, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan pemahaman bahwa ada peran tertentu yang lebih cocok untuk masing-masing gender. Sebagai contoh, beberapa siswa perempuan merasa lebih cocok untuk menggeluti bidang yang berhubungan dengan kegiatan sosial atau pengasuhan, sementara siswa laki-laki cenderung lebih memilih cita-cita yang dianggap membutuhkan kekuatan fisik atau kepemimpinan.

Hal ini mencerminkan bahwa meskipun di tingkat kebijakan dan kurikulum terdapat dorongan untuk menciptakan kesetaraan, pandangan sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat masih mempengaruhi cara siswa memahami konsep tersebut. Persepsi ini tampaknya juga berdampak pada pilihan kegiatan yang mereka ikuti, di mana seringkali kegiatan yang dianggap "maskulin" atau "feminim" masih dipilih berdasarkan gender. Sebagai contoh, siswa laki-laki lebih cenderung memilih kegiatan olahraga atau kegiatan yang membutuhkan fisik, sedangkan siswa perempuan lebih sering terlibat dalam kegiatan kebersihan atau mengatur kelas.

Para guru di MIN 1 Banyumas berusaha untuk mengubah persepsi ini dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk

memilih peran dalam berbagai kegiatan sekolah tanpa menghiraukan gender. Dalam praktiknya, siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang sebelumnya dianggap lebih sesuai dengan gender tertentu. Guru-guru mendorong siswa untuk lebih terbuka dan percaya diri dalam mengeksplorasi berbagai peran, baik di dalam maupun di luar kelas.

Meskipun demikian, para guru menyadari bahwa perubahan persepsi ini tidak dapat terjadi dalam waktu singkat. Diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat, untuk mengubah pandangan tersebut. Guru-guru berharap bahwa dengan terus melibatkan siswa dalam kegiatan yang inklusif dan mendukung mereka dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan gender, siswa akan lebih mudah memahami dan menerima konsep kesetaraan gender. Seiring waktu, diharapkan kesetaraan gender akan menjadi bagian yang lebih diterima dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan data yang mendukung hasil mengenai persepsi siswa terhadap kesetaraan gender dalam proses belajar mengajar di MIN 1 Banyumas:

Aspek	Deskripsi Data	Sumber Data
Pemahaman Siswa Tentang Peran Gender	Beberapa siswa masih memiliki persepsi bahwa ada peran tertentu yang lebih cocok untuk laki-laki atau perempuan, misalnya dalam cita-cita atau pilihan kegiatan.	Wawancara dengan Siswa
Pengaruh Pandangan Masyarakat	Persepsi siswa tentang peran gender sangat dipengaruhi oleh pandangan sosial di masyarakat sekitar yang cenderung membatasi pilihan dan peran berdasarkan gender.	Wawancara dengan Siswa
Pilihan Kegiatan Berdasarkan Gender	Siswa laki-laki lebih cenderung memilih kegiatan yang berhubungan dengan kekuatan fisik atau kepemimpinan, sementara siswa perempuan memilih kegiatan yang berhubungan dengan sosial.	Observasi Kegiatan Belajar Mengajar dan Wawancara

Pendekatan Guru untuk Mengubah Persepsi	Guru-guru mendorong siswa untuk memilih peran yang beragam tanpa menghiraukan gender, namun ini memerlukan waktu dan dukungan berkelanjutan untuk mengubah persepsi siswa.	Wawancara dengan Guru dan Observasi
Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat	Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran dalam membentuk persepsi siswa terkait peran gender, yang dapat mendukung atau menghambat implementasi kesetaraan gender di sekolah.	Wawancara dengan Orang Tua dan Guru

Tabel ini menggambarkan data yang mendukung pemahaman mengenai persepsi siswa terhadap kesetaraan gender. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua mengindikasikan bahwa meskipun ada usaha untuk mengubah persepsi gender melalui kebijakan sekolah, pengaruh dari masyarakat sekitar, kebiasaan, dan norma sosial masih kuat dan perlu penanganan lebih lanjut.

Tantangan penerapan kesetaraan gender di MIN 1 Banyumas merupakan masalah yang kompleks meskipun sekolah ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap upaya tersebut. Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah adanya stereotip gender yang masih muncul dalam praktik sehari-hari di sekolah. Meskipun kebijakan dan praktik pengajaran di sekolah sudah mendukung kesetaraan, norma sosial yang sudah lama tertanam dalam masyarakat tetap mempengaruhi cara siswa diperlakukan dan bagaimana tugas-tugas di sekolah dibagi.

Contoh yang paling mencolok adalah pembagian tugas yang sering kali masih didasarkan pada peran gender tradisional. Siswa perempuan sering dipilih untuk tugas-tugas yang dianggap "halus" atau rapi, seperti mengatur peralatan kelas, menyusun buku, atau membersihkan ruang kelas, sementara siswa laki-laki lebih sering dilibatkan dalam tugas-tugas yang memerlukan kekuatan

fisik, seperti mengangkat barang atau membersihkan area luar sekolah. Praktik ini, meskipun tidak ada instruksi eksplisit dari kurikulum, tetap mencerminkan penerapan stereotip gender yang mengakar kuat dalam masyarakat. Guru-guru di MIN 1 Banyumas mengakui bahwa pembagian tugas semacam ini lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dan norma sosial yang ada daripada kebijakan yang tercantum dalam kurikulum.

Meskipun demikian, para guru juga menyadari bahwa meskipun tujuan Kurikulum Merdeka adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara, tantangan terbesar mereka adalah mengubah persepsi yang sudah terbangun mengenai peran gender di kalangan siswa dan orang tua. Mereka berupaya untuk secara bertahap mengurangi pengaruh stereotip gender dalam pembagian tugas, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan dalam tugas yang lebih beragam dan tidak terbatas pada peran tradisional yang diharapkan dari mereka berdasarkan jenis kelamin. Ini adalah upaya yang tidak mudah karena perubahan yang terjadi relatif lambat, terhalang oleh kebiasaan sosial yang sudah lama terbentuk, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Meskipun ada tantangan ini, para guru di MIN 1 Banyumas mulai mendorong siswa untuk mengambil peran yang lebih

beragam, di luar stereotip gender yang ada. Dengan pendekatan pembelajaran yang inklusif, mereka berharap siswa akan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang kesetaraan gender. Namun, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, karena adanya tekanan dari kebiasaan sosial yang sudah lama terbentuk di masyarakat. Guru-guru berharap bahwa dengan terus menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar, mereka dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih setara untuk semua siswa.

Teori-teori yang mendukung pemahaman ini, seperti Teori Sosialisasi Gender, dapat menjelaskan bagaimana norma-norma sosial yang ada di masyarakat membentuk persepsi siswa terhadap peran gender. Sosialisasi gender ini terjadi sejak usia dini, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat, yang akhirnya membentuk pemahaman anak-anak tentang peran laki-laki dan perempuan (Kumalasari, 2022). Di sekolah, pembagian tugas berdasarkan stereotip gender ini menunjukkan bagaimana norma sosial yang ada terus mempengaruhi praktik-praktik di kelas, meskipun kurikulum mengarah pada pembelajaran yang inklusif.

Selain itu, teori Peran Sosial juga relevan dalam menjelaskan fenomena ini. Pembagian tugas yang berbasis gender mencerminkan ekspektasi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, yang sudah terbentuk dalam masyarakat. Mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu dan usaha bersama, tidak hanya dari pihak guru, tetapi juga dari orang tua dan masyarakat (Nugroho, 2022). Teori Perubahan Sosial, di sisi lain, menunjukkan bahwa perubahan dalam sikap dan persepsi tentang peran

gender bisa terjadi secara perlahan, namun dengan penerapan prinsip kesetaraan dalam pendidikan, terutama dengan Kurikulum Merdeka, diharapkan perubahan itu bisa tercapai (Davita & Pujiastuti, 2020).

Teori Feminisme Pendidikan memberikan perspektif lebih dalam mengenai pentingnya pendidikan yang berfokus pada kesetaraan gender, serta menghapuskan perbedaan-perbedaan yang ada berdasarkan jenis kelamin. Penerapan teori ini dalam praktek sehari-hari di MIN 1 Banyumas diharapkan dapat menciptakan ruang kelas yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berperan dalam segala jenis kegiatan.

Teori Konstruksionisme Sosial juga dapat membantu menjelaskan mengapa pembagian tugas berbasis gender tetap ada, karena peran gender yang ada adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial di masyarakat. Dengan kesadaran akan konstruksi sosial ini, diharapkan dapat terjadi perubahan dalam cara pandang terhadap peran gender. Terakhir, Teori Pembelajaran Sosial menunjukkan bahwa siswa belajar dengan mengamati dan meniru perilaku di sekitar mereka, sehingga perubahan dalam praktik pengajaran di sekolah akan sangat berpengaruh terhadap sikap siswa terhadap peran gender (Bandura, 1989).

Secara keseluruhan, tantangan dalam penerapan kesetaraan gender di MIN 1 Banyumas menggambarkan realitas bahwa kesetaraan gender tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada perubahan sosial yang memerlukan waktu dan usaha bersama. Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, diharapkan para pendidik dapat menemukan solusi yang efektif dalam

mengatasi stereotip gender, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang lebih setara bagi semua siswa.

5. Upaya dan Rekomendasi untuk Meningkatkan Implementasi Kesetaraan Gender di MIN 1 Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian, MIN 1 Banyumas telah mengambil langkah-langkah positif dalam menerapkan kesetaraan gender, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Salah satu rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya program pelatihan dan penyadaran bagi guru dan staf sekolah mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Selain itu, diperlukan program yang melibatkan orang tua dan komunitas sekolah agar stereotip gender yang masih berkembang di masyarakat dapat diminimalisir di lingkungan sekolah.

Dengan mengadakan program penyadaran dan pelatihan yang terarah, diharapkan para pendidik dapat lebih terampil dalam mendorong siswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan secara setara. Pihak sekolah juga diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa. Kesimpulannya, Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas dapat diimplementasikan dengan lebih optimal dalam konteks kesetaraan gender melalui kolaborasi yang kuat antara sekolah, guru, siswa, dan komunitas.

Berikut adalah tabel yang mendukung hasil rekomendasi berdasarkan penelitian mengenai penerapan kesetaraan gender di MIN 1 Banyumas:

Aspek	Deskripsi Data	Sumber Data
Pelatihan dan Penyadaran untuk Guru dan Staf Sekolah	Diperlukan program pelatihan dan penyadaran bagi guru dan staf sekolah mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan, agar mereka lebih terampil dalam mengimplementasikan konsep ini.	Rekomendasi dari Penelitian
Program yang Melibatkan Orang Tua dan Komunitas Sekolah	Penting untuk melibatkan orang tua dan komunitas sekolah dalam program penyadaran untuk mengurangi stereotip gender yang masih berkembang di masyarakat dan memastikan kesetaraan gender di sekolah.	Wawancara dengan Guru dan Orang Tua
Peningkatan Partisipasi Siswa dalam Kegiatan yang Setara	Program untuk mendorong siswa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah secara setara, tanpa diskriminasi gender.	Wawancara dengan Siswa dan Observasi
Integrasi Kesetaraan Gender dalam Kegiatan Ekstrakurikuler	Pihak sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa untuk mendukung perkembangan siswa secara inklusif.	Rekomendasi dari Penelitian
Kolaborasi Antara Sekolah, Guru, Siswa, dan Komunitas	Diperlukan kolaborasi yang kuat antara sekolah, guru, siswa, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara dalam penerapan Kurikulum Merdeka.	Rekomendasi dari Penelitian

Tabel ini mengorganisir rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian mengenai penerapan kesetaraan gender di MIN 1

Banyumas, yang meliputi pelatihan guru, program melibatkan orang tua, peningkatan partisipasi siswa, dan integrasi kesetaraan

gender dalam ekstrakurikuler. Tabel ini juga menunjukkan sumber data yang mendasari setiap rekomendasi, baik dari wawancara, observasi, maupun temuan penelitian.

Persepsi siswa mengenai kesetaraan gender di MIN 1 Banyumas menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan kurikulum pendidikan mendukung upaya untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif dan setara, pandangan sosial yang ada di masyarakat masih mempengaruhi cara siswa memahami dan menerima konsep kesetaraan gender. Hasil wawancara dengan siswa mengungkapkan bahwa banyak dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pandangan bahwa ada peran tertentu yang lebih cocok untuk masing-masing gender. Misalnya, beberapa siswa perempuan merasa lebih cocok untuk memilih cita-cita atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan sosial atau pengasuhan, sementara siswa laki-laki lebih tertarik pada cita-cita yang dianggap membutuhkan kekuatan fisik atau kepemimpinan.

Persepsi ini juga berdampak pada pilihan kegiatan yang diikuti siswa. Siswa laki-laki cenderung memilih kegiatan yang berhubungan dengan kekuatan fisik atau kepemimpinan, seperti olahraga, sementara siswa perempuan lebih sering terlibat dalam kegiatan yang dianggap lebih sosial atau berhubungan dengan kebersihan dan pengaturan kelas. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada dorongan kebijakan untuk menciptakan kesetaraan gender, pandangan yang terbentuk oleh norma sosial masyarakat masih membatasi pilihan dan peran yang diambil oleh siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Untuk mengubah persepsi ini, para guru di MIN 1 Banyumas berusaha memberikan

kebebasan kepada siswa untuk memilih peran dalam berbagai kegiatan sekolah tanpa menghiraukan gender. Guru-guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang sebelumnya dianggap lebih sesuai dengan gender tertentu, seperti mengajak siswa perempuan untuk berpartisipasi dalam olahraga atau mendorong siswa laki-laki untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Guru-guru berharap bahwa melalui pendekatan ini, siswa akan semakin terbuka dan percaya diri dalam mengeksplorasi berbagai peran, baik di dalam maupun di luar kelas (Selvira, 2023).

Namun, perubahan dalam persepsi siswa tidak dapat terjadi dalam waktu singkat. Guru-guru di MIN 1 Banyumas menyadari bahwa untuk mengubah pandangan ini diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat. Mereka berharap bahwa dengan terus melibatkan siswa dalam kegiatan yang inklusif dan memberikan mereka kebebasan dalam memilih peran tanpa mempertimbangkan gender, siswa akan lebih mudah memahami dan menerima konsep kesetaraan gender. Dengan waktu yang cukup dan dukungan yang terus-menerus, diharapkan kesetaraan gender akan menjadi bagian yang lebih diterima dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Untuk mendalami lebih jauh mengenai pengaruh persepsi siswa terhadap kesetaraan gender, beberapa teori sosial dan pendidikan dapat dijadikan landasan. Teori Sosialisasi Gender menjelaskan bahwa sejak kecil, individu terpapar pada norma-norma sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan (Noer et al., 2021). Dalam konteks sekolah, anak-anak belajar mengenai peran gender melalui interaksi dengan orang

tua, teman sebaya, dan pendidik. Meskipun kurikulum mengarah pada pembelajaran yang lebih inklusif, pengaruh dari keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas tetap memegang peranan penting dalam membentuk persepsi mereka tentang peran gender.

Selain itu, Teori Peran Sosial juga relevan untuk memahami bagaimana pembagian tugas dan peran dalam kehidupan sehari-hari sering kali didasarkan pada konstruksi sosial tentang apa yang dianggap "sesuai" untuk laki-laki atau perempuan. Dalam hal ini, persepsi siswa yang terpengaruh oleh norma sosial tentang peran gender akan membentuk cara mereka melihat dunia dan memilih peran dalam aktivitas sekolah. Misalnya, siswa laki-laki cenderung memilih kegiatan yang melibatkan kekuatan fisik, sementara siswa perempuan memilih kegiatan yang berhubungan dengan sosial, karena mereka melihat hal itu sebagai bagian dari identitas gender mereka (Rahayu & Hamdani, 2023).

Teori Konstruksionisme Sosial juga dapat membantu menjelaskan mengapa persepsi gender ini terbentuk dan bertahan. Menurut teori ini, persepsi tentang gender dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun siswa belajar tentang kesetaraan gender di sekolah, pengalaman mereka di luar sekolah, terutama di rumah dan masyarakat, turut berperan dalam membentuk pandangan mereka. Oleh karena itu, perubahan persepsi siswa tentang kesetaraan gender memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan peran serta keluarga, masyarakat, dan sekolah itu sendiri (Rasmuin et al., 2023).

Teori Pembelajaran Sosial, yang dikemukakan oleh Albert Bandura, menggarisbawahi pentingnya model peran

dalam pembentukan perilaku. Siswa belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain di sekitar mereka. Jika mereka terus melihat pembagian tugas dan peran berdasarkan gender yang tradisional, mereka akan cenderung meniru perilaku tersebut (Wahab & Kahar, 2022). Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan guru sebagai model peran yang mendukung kesetaraan gender sangat penting dalam membantu siswa mengubah persepsi mereka.

Secara keseluruhan, perubahan dalam persepsi siswa mengenai kesetaraan gender di MIN 1 Banyumas memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Dukungan dari pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan perubahan yang lebih menyeluruh. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai teori-teori ini, diharapkan proses perubahan persepsi gender akan semakin efektif dan kesetaraan gender dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Kesimpulan

Kesetaraan gender dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MIN 1 Banyumas diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan setara bagi semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin. Meskipun kebijakan dan kurikulum secara eksplisit mendukung kesetaraan gender, tantangan dalam implementasinya tetap ada, baik di tingkat kebijakan maupun dalam praktik sehari-hari. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru untuk mengembangkan materi ajar yang mendorong kesetaraan dan keadilan, termasuk dalam hal pembagian tugas dan peran dalam kegiatan sekolah. Namun,

meskipun kebijakan ini sudah diupayakan, pembagian tugas di kelas masih dipengaruhi oleh stereotip gender yang berkembang di masyarakat. Siswa perempuan lebih sering dipilih untuk tugas-tugas yang dianggap "halus" atau membutuhkan ketelitian, sedangkan siswa laki-laki lebih sering terlibat dalam tugas-tugas yang membutuhkan kekuatan fisik. Guru-guru di MIN 1 Banyumas berusaha mengurangi pengaruh stereotip ini dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk berpartisipasi dalam berbagai peran, tanpa terikat pada peran tradisional yang ditentukan berdasarkan gender. Selain itu, persepsi siswa mengenai kesetaraan gender masih dipengaruhi oleh pandangan sosial yang berkembang di masyarakat sekitar. Meskipun guru berusaha untuk membimbing siswa agar lebih terbuka dan memilih peran tanpa mempertimbangkan gender, perubahan dalam persepsi ini tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu dan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat, agar siswa dapat memahami dan menerima konsep kesetaraan gender secara lebih luas. Secara keseluruhan, meskipun Kurikulum Merdeka memberikan landasan yang kuat untuk menerapkan kesetaraan gender, tantangan dalam mengubah kebiasaan sosial dan persepsi yang ada di masyarakat tetap menjadi hambatan. Untuk mencapai tujuan kesetaraan gender yang lebih efektif, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif yang melibatkan peran aktif semua pihak, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Daftar Pustaka

- Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 4(02), Article 02. <https://doi.org/10.46772/kontekstual.v4i02.995>
- Aliyah, I. M., Yuhana, Y., & Santosa, C. A. H. F. (2019). Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Ditinjau dari Kemampuan Awal dan Gender. *Jurnal Didaktik Matematika*, 6(2), 161–178.
- Aras, A. (2021). Revitalisasi Kultur Sekolah dalam Pembangunan Karakter Peserta Didik. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 3(1), 26–34.
- Ayu, R. F., & Filzah, N. (2023). Pengaruh Ketidakadilan Gender Dan Implikasinya Dalam Keluarga. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 5(1), 78–89.
- Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. *American Psychologist*, 44(9), 1175–1184. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.9.1175>
- Butler, J. (2020). Performative acts and gender constitution: An essay in phenomenology and feminist theory. In *Feminist theory reader* (pp.353–361). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003001201-42/performative-acts-gender-constitution-judith-butler>

- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2023). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning*. John Wiley & sons. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QhLeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=2.%09Richard+E.+Mayer+M+ULTIMEDIA+LEARNING&ots=t9W13nMw-D&sig=FhH6LigFsk71mQTSUfyXmpBK81I>
- Davita, P. W. C., & Pujiastuti, H. (2020). Analisis kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari gender. *Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif*, 11(1), 110–117.
- Freire, P. (2018). *Pedagogy of the oppressed*. Bloomsbury publishing USA.
- Kumalasari, R. (2022). Perempuan dan moderasi beragama: Potensi dan tantangan perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 50–58.
- Lestari, W. T. I., & Suprpto, D. (2020). Representasi Feminisme Dalam Film 7 Hari 7 Cinta 7 Wanita. *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science*, 2(1), 23–37.
- Noer, K. U., Hanafi, A., Khairunnisa, D. A., & Putri, F. D. (2021). Sekolah Ramah Anak, Disiplin, Dan Budaya Kekerasan Di Sekolah Di Indonesia. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.393>
- Nugroho, R. B. (2022). Kesetaraan Gender dalam Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil alamin dalam Kurikulum Merdeka. *Proceeding Annual Conference on Madrasah Teacher*, 5, 1–6. <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/ACoMT/article/view/1098>
- Rahayu, R., & Hamdani, A. (2023). Gender dan Kolonial pada Pemberitaan Online Indonesia:(Analisis Wacana Kritis Sara Mills pada Pemberitaan Media Indonesia Tahun 2023). *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 105–121.
- Rasmuin, R., Anggraini, R. D., & Umam, R. K. (2023). Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender Pada Pengemudi Gojek Perempuan di Kota Malang. *Jurnal Diversita*, 9(1), 68–77.
- Rawls, J. (2008). Political Liberalism. In *The New Social Theory Reader* (2nd ed.). Routledge.
- Selvira, P. (2023). Kesetaraan Tokoh Laki-laki dan Perempuan pada Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam: Analisis Wacana Gender. *Indonesian Journal of Gender and Child Studies*, 1(1), 38–47.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Vigotsky, A. D., Halperin, I., Lehman, G. J., Trajano, G. S., & Vieira, T. M. (2018). Interpreting signal amplitudes in surface electromyography studies in sport and rehabilitation sciences. *Frontiers in Physiology*, 985.
- Wahab, G., & Kahar, M. I. (2022). Perempuan dan Moderasi Beragama. *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, 1(01), 370–379.

This page is intentionally left blank